

**Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**

**Ridha Maysaroh, Muhammad Arif**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[ridhamaysaroh@gmail.com](mailto:ridhamaysaroh@gmail.com), [mhdarif1895@gmail.com](mailto:mhdarif1895@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to describe how the role of physical regional special allocation funds (DAK) in increasing the human development index (IPM) and economic growth in the province of North Sumatra. This study uses a library research approach with data sources used in the form of books, magazines and websites that are relevant to the research topic. The data collection technique in this research is documentation, which is looking for data about things or variables in the form of notes, pictures, books, papers or articles and journals. The results of the study indicate that a well-managed and targeted DAK will improve the Human Development Index (IPM). A good Human Development Index (HDI) will encourage economic growth, especially in DAK in North Sumatra Province. This is because if DAK is managed by the government properly it can improve the quality of education, health services, can reduce damage to infrastructure and so on in the area. The Physical Special Allocation Fund (DAK) is a fund sourced from the APBN which is allocated to certain regions to help fund special activities in the region and in line with national priorities, in particular to finance the needs for basic public service facilities and infrastructure that have not yet reached certain standards. The amount of DAK allocation in each region is determined by index calculation based on general criteria, special criteria, and technical criteria. Meanwhile, to become a national priority, the regional government's work plan must also be included in the government's work plan for the relevant fiscal year. With the existence of a special allocation fund, it can support the level of the Human Development Index (IPM) through community services, health services, infrastructure development and infrastructure in the regions which indirectly affect the welfare of the community itself.*

**Keywords: Special Allocation Fund, Human Development Index, Economic Growth**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dana alokasi khusus daerah (DAK) fisik dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber data yang digunakan berupa buku, majalah dan website yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, gambar, buku, makalah atau artikel dan jurnal. Hasil penelitian menyatakan bahwa DAK yang dikelola dengan baik dan terarah akan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi pula terkhusus pada DAK di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan apabila DAK dikelola pemerintah dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya pada daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus di daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Besaran alokasi DAK di setiap daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sementara itu, untuk menjadi prioritas nasional rencana kerja pemerintah daerah juga harus masuk dalam rencana kerja pemerintah di tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan adanya Dana alokasi khusus dapat menunjang tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana di daerah yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri.

Kata kunci : Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah memiliki fungsi penting terhadap berlangsungnya perekonomian di suatu negara. Menurut perekonomian modern peran pemerintah diklasifikasikan kedalam fungsi a). stabilisasi: yakni menjaga stabilitas dan memulihkan perekonomian negara apabila berada pada keadaan yang tidak seimbang, b). alokasi: yakni mengalokasikan sumber daya ekonomi agar bisa digunakan secara efektif dan juga optimal, dan c). distribusi: yakni sebagai distributor ekonomi. Berhasil atau tidaknya

pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat tergambarkan melalui tingkat pencapaian sasaran/tujuan organisasi dan penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi pada kinerja instansi pemerintah. Realisasi anggaran yang rendah dan tidak merata menjadi salah satu bukti bahwa kinerja instansi pemerintah dilakukan masih belum optimal. Anggaran yang terealisasi secara tidak merata dan rendah itu pun salah satunya terjadi dalam kegiatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu atau sesuai dengan kriteria penerima DAK demi membantu mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut dan searah dengan prioritas nasional. Daerah yang menerima alokasi DAK ditentukan berdasarkan etika umum, etika khusus, dan etika teknis. Sedangkan, untuk dapat menjadi prioritas nasional rencana kerja daerah juga harus termasuk dalam rencana kerja pemerintah di tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya, tujuan dari diselenggarakannya program DAK Fisik adalah untuk mendukung kinerja kegiatan fisik khusus yang memiliki dampak luas bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu berbagai sektor penting dari daerah-daerah yang merupakan prioritas nasional didanai melalui program DAK Fisik. DAK Fisik juga dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik di daerah yang sesuai dengan prioritas negara dan demi meminimalisir adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antara daerah dan pelayanan antar bidang.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan dasar DAK fisik memiliki peran penting terhadap dinamika pembangunan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berasal dari daerah dengan umur ekonomis panjang. Alokasi DAK ke daerah yang akan dituju sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu. Pengelolaan DAK untuk kegiatan pembangunan dapat merangsang kegiatan ekonomi dan mempercepat pembangunan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumut (2019), Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota dimana terdiri dari 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten. Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya menerima anggaran dana dari pemerintahan pusat salah satunya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang nantinya akan di alokasikan ke desa-desa. Besarnya peran DAK Fisik dalam memberikan fasilitas sarana-prasarana dan mendukung pelaksanaan kegiatan khusus pemerintah di daerah untuk mencapai prioritas nasional, DAK Fisik masih belum dapat terpenuhi secara maksimal di provinsi sumatera utara. Adapun menurut Kementerian Keuangan RI (2021)

Realisasi DAK Fisik masih dikatakan belum optimal dari besaran alokasi yang diberikan. Berikut adalah besaran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan realisasinya di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.

**Tabel 1. 1**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2017-2021 Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2017	345,11 M	276,80 M	80.21
2018	352,58 M	315,56 M	89.50
2019	390,62 M	341,92 M	87.53
2020	364,65 M	335,51 M	92.01
2021	351,82 M	261,03 M	74.19

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Besaran dana alokasi khusus (DAK) Fisik mengalami perubahan di setiap tahunnya bersamaan dengan realisasi yang diberikan. Setiap pemerintah daerah tentu memiliki program atau kegiatan demi mensejahterakan rakyatnya. Dana alokasi khusus berfungsi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan prasarana pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah. Melalui DAK akan meringankan beban pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus daerah yang pada akhirnya menjadi prioritas nasional.

Melalui dana alokasi khusus juga tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat terbantu melalui pengadaan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana di daerah dimana secara tidak langsung program-program tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri. Menurut Adel Rivianto, Henri dan Halmawati (2019) pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan dengan baik turut meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan membantu meringankan kerusakan infrastruktur sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Begitupun tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan, pelayanan publik dan lain sebagainya akan berdampak pada Indeks Pembangunan manusia yang baik pula. Adel Rivianto, Henri dan Halmawati (2019) juga menambahkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) turut berperan dalam memperbaiki kualitas pembangunan manusia di suatu daerah.

IPM ialah bagaimana penduduk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dari hasil pembangunan yang dapat diakses. Menurut BPS

(2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran dalam mencapai pembangunan yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia. Kualitas SDM terlihat dari taraf pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat pendapatan penduduk dimana ketiga aspek tersebut menjadi komponen utama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain dari penyediaan lapangan kerja yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat peningkatan pembangunan merupakan jaminan untuk mendapatkan pendapatan yang layak pula demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap warga Indonesia sepenuhnya berhak mendapatkan pelayanan publik diantaranya pendidikan, kesehatan dan sosial. Dengan kualitas SDM yang meningkat akan turut berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Adel Rivianto, dkk (2019) beranggapan dana alokasi khusus memiliki dampak kepada indeks pembangunan manusia. Dalam arti, semakin besar dana alokasi khusus maka semakin tinggi indeks pembangunan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Berbeda dengan hasil penelitian Evi Sulastri dan Efendri (2021) yang menjelaskan bahwa DAK tidak terlalu berpengaruh dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi. Penerimaan DAK yang cukup besar pada sebagian daerah tidak berdampak pada peningkatan IPM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Teja Rinanda dan Subambang H (2020) yang beranggapan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berdampak kepada tingkat Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.

Adanya realisasi Dana Alokasi (DAK) Fisik yang tidak optimal dimana dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk membantu mendanai program pemerintah daerah yang mana demi prioritas nasional serta adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya terkait DAK Fisik yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi mendorong peneliti untuk mengambil judul **“Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara”**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas adapun rumusan masalah yang peneliti dapatkan pada penelitian ini yakni, bagaimana Peran Dana Alokasi Khusus Fisik dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Serta tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dana Alokasi Khusus Fisik dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Dana Alokasi Khusus atau DAK berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka membantu mendanai kegiatan khusus di daerah sehingga pengalokasian tersebut juga menjadi prioritas nasional. Besaran alokasi DAK untuk setiap daerah dilihat menurut perhitungan indeks berdasarkan tiga kriteria yakni umum, khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan atas dasar kondisi kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari total anggaran yang diterima dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil daerah. Kriteria khusus diukur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan kriteria terakhir adalah kriteria teknis berdasarkan rumusan indeks regional Menteri Keuangan, dengan memperhatikan informasi dari Menteri Negara Perencanaan.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2019 mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020. Dalam Peraturan Presiden ini, DAK fisik terdiri dari: DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. DAK fisik mencakup: pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, industri kecil dan menengah, Pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, saluran pembuangan, irigasi, pasar, alam dan hutan, transportasi pedesaan, transportasi air dan sosial. Menurut <http://kppnmetro.org/dak-fisik> DAK Fisik tersebut masing-masing memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. DAK Fisik Reguler diarahkan guna membuat kualitas kesejahteraan masyarakat semakin meningkat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
2. DAK Fisik Penugasan diarahkan guna membantu tercapainya prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi yang menjadi prioritas tertentu.
3. DAK Fisik Afirmasi diarahkan guna mempersingkat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di lokasi yang menjadi prioritas termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Sedangkan besaran alokasi pada masing-masing daerah dilihat berdasarkan perhitungan indeks, diantaranya kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Berikut adalah penjelasan terkait ketiga kriteria tersebut:

- 1) Kriteria Umum

Menurut pasal 55 PP No. 55/2005 kriteria umum dirumuskan berdasarkan kapasitas keuangan daerah yang terlihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi oleh belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## 2) Kriteria Khusus

Kriteria khusus ditentukan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait aturan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus yang digunakan untuk perhitungan alokasi DAK, adalah:

- a. Setiap daerah tertinggal/terpencil.
- b. Daerah tersebut memiliki karakteristik: daerah tepi laut dan pulau-pulau kecil, daerah yang merupakan perbatasan dengan negara lain, daerah yang rawan mengalami bencana banjir/longsor, daerah yang termasuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah untuk pariwisata.

## 3) Kriteria Teknis

Kriteria Teknis dibuat menurut indikator-indikator yang bisa menggambarkan keadaan sarana dan prasarana, tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ialah salah satu metode dalam menghitung pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Menurut *United Nation Development Programme* (1990), untuk menghitung keberhasilan pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Bada Pusat Statistik (2020) IPM menerangkan bagaimana penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dari akses hasil pembangunan. Dalam menentukan tingkat keberhasilannya, IPM diukur dengan memperhatikan tiga komponen dasar diantaranya umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Pemerintah harus selalu mengupayakan pertumbuhan dan pembangunan demi membuat generasi yang berperan dalam meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Dimana perlu diingat bahwa permasalahan fundamental dalam pembangunan ini ada pada tingkat kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat baik secara fisik atau non fisik. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat tiga aspek pada pembangunan manusia yang menitikberatkan peningkatan kualitas SDM, yakni dapat dilihat pada: aspek kesehatan, yang dihitung menurut besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang dihitung menurut harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli. Adanya kecenderungan kebutuhan dasar yang lebih besar pada konsep pembangunan sumber daya manusia, pemerintah perlu memberikan penanganan yang intensif dalam mengelolanya. Berdasarkan hubungan ketiga aspek

tersebut terhadap aspek lainnya, bahwa dengan memberikan penanganan yang baik pada ketiga aspek tersebut akan turut memberikan dampak baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan memperhatikan pembangunan sumber daya manusia pada aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak positif terhadap aspek lainnya.

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses pada kapasitas produktif yang meningkat di dalam suatu perekonomian berkepanjangan atau berkesinambungan sehingga tingkat pendapatan dan output nasional yang dihasilkan juga semakin besar. Pertumbuhan ekonomi kerap dihubungkan dengan pembangunan manusia. Adanya kaitan yang sangat erat pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, bahwa semakin banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan ikut membaik melalui peningkatan kualitas SDMnya. Dengan modal manusia yang berkualitas diyakini juga kinerja ekonomi akan lebih baik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan-dukungan pembangunan. Di dalam pemerintah daerah pembangunan sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang baik pada pertumbuhan ekonomi. Adanya tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk menjadi syarat pokok dalam pembangunan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik.

Adam Smith dalam teori pertumbuhan klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpegang pada pertumbuhan penduduk. Manusia yang memiliki peran sebagai faktor produksi utama memungkinkan melakukan spesialisasi pada input produksi yang mengakibatkan produktivitas meningkat. Dalam arti Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang berperan sebagai spesialisasi input produksi akan mendorong peningkatan produktivitas.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *Library Research*. Menurut Mardalis (1999) *Library Research* adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan pustaka

seperti dokumen, buku, majalah, cerita sejarah, dan lain-lain. Sarwo menyatakan melalui studi kepustakaan seorang peneliti dapat mempelajari berbagai referensi dan hasil serupa dari penelitian terdahulu yang nantinya berguna untuk memperoleh landasan teori pada masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah dan website yang relevan dengan topik yang dipilih dan data tersebut merupakan tulisan ilmiah yang sudah terbukti kevalidannya secara akademik. Adapun teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara dalam mencari data dan sumber melalui catatan, buku, gambar, angka, makalah atau artikel dan jurnal terkait hal-hal atau variabel yang sesuai dengan topik penelitian.

Langkah pertama pada penelitian ini adalah menggabungkan dan mempelajari berbagai sumber yang didapat dari hasil penelitian terdahulu. kemudian memasukkan data guna mendukung penelitian ini melalui jurnal, buku atau internet. Setelah data terkumpul dan dipahami, dilakukan dengan membuat pengolahan-pengolahan data. Pengolahan data itu kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

DAK nasional dimuat dalam APBN, berdasarkan kemampuan APBN. yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Terdapat dua tahapan dalam membuat perhitungan alokasi DAK, yakni: (a) Menentukan daerah yang dapat menerima DAK sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan (b) Menentukan besaran alokasi DAK di masing-masing daerah.

Dalam menentukan daerah penerima DAK harus memiliki kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK di masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis pula. Kriteria umum sebagaimana dihitung menurut kapasitas keuangan daerah yang dilihat dari penerimaan umum APBD dikurang belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kapasitas keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Sehingga daerah yang memenuhi kriteria umum ditetapkan sebagai daerah dengan indeks fiskal netto setiap tahun. Adapun kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- (a) Penyelenggaraan otonomi khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (b) Karakteristik daerah.

Kriteria khusus dihitung melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan melalui pertimbangan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria

teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dimana menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

Menurut Zul Fadhly (2018) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membiayai pelayanan publik daerah kabupaten/kota demi mengurangi adanya kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Jika diperhatikan berbagai pengeluaran yang bersumber dari DAK, justru sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal. Oleh karena itu, guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut DAK sangat mempengaruhi peningkatan belanja modal. Alokasi belanja modal pada penggunaan DAK yang dilakukan secara terarah, transparan dan optimal akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, atau pelayanan umum lainnya.

Fungsi utama DAK Fisik adalah untuk meringankan pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus di daerah dengan kriteria tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terutama dalam hal pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Demi meningkatkan fasilitas publik DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal. Dalam hal ini, berarti DAK memiliki peran dalam mendanai kebutuhan pelayanan masyarakat di daerah-daerah. Oleh karena itu dengan terpenuhinya secara optimal kebutuhan pelayanan masyarakat melalui DAK Fisik akan turut meningkatkan kualitas masyarakat.

Menurut Adel Rivianto, dkk (2019) jika DAK yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tinggi, akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut secara tidak langsung. Tingkat mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan perbaikan kerusakan infrastruktur yang baik didapat dari pengelolaan DAK yang optimal pada daerah tersebut. Irianto, dkk (2021) juga menyatakan bahwa sebagai salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan kesehatan dan pendidikan juga perlu dilihat. Dimana kualitas SDM dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kesehatan dan pendidikan juga merupakan investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari bantuan dana yang dilakukan secara optimal juga berdampak pada IPM yang baik. Dengan adanya kualitas IPM yang baik akan turut berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Nurkholila Harahap (2018) menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada alokasi dana desa akan turut meningkatkan PDRB yang pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga ikut naik. Menurutnya berdasarkan Teori Keynes dalam *The General Theory Keynes* bahwa pengeluaran pemerintah untuk Alokasi Dana Daerah memberi efek multiplier pada permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 2 No 3 (2022) 322-335 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1426

Multiplier effect (efek berganda) berdasarkan pengertian dari Kementerian Keuangan RI adalah pengaruh yang meluas akibat dari suatu kegiatan ekonomi dimana pengeluaran nasional yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi.

DAK akan berdampak baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jika dilakukan secara optimal dan terarah. Dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik khususnya pada daerah kab/kota di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melalui DAK saja melainkan dana perimbangan lain seperti DAU dan DBH. DAK memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Dikarenakan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kualitas SDM yang baik pula dimana kualitas SDM ini didapat salah satunya dari pelayanan masyarakat baik melalui sarana prasarana, infrastruktur dan lain sebagainya yang dananya sebagian bersumber dari DAK.

## **KESIMPULAN**

DAK Fisik berperan dalam membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus di daerah tersebut seperti membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, pertanian, perikanan/kelautan, keluarga berencana, sarana dan prasarana daerah tertinggal, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, lingkungan hidup, kehutanan, perdagangan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, transportasi pedesaan, Sarana dan prasarana kawasan perbatasan, serta Keselamatan transportasi darat.

Melalui bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan secara optimal dan terarah akan berdampak kepada kualitas masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). DAK yang dikelola pemerintah secara optimal dapat menimbulkan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, mengurangi kerusakan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya pada suatu daerah. Dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif pula.

## **SARAN**

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 2 No 3 (2022) 322-335 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1426

Adapun saran pada penelitian ini adalah, dalam pengalokasian DAK perlunya ditingkatkan kembali pemantauan/pengawasan agar alokasi dana tersebut dapat berjalan secara terarah dan tidak disalahgunakan. pemerintah daerah seharusnya mengetahui kegiatan apa saja yang perlu didanai menjadi prioritas untuk daerahnya agar semua kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fadhly, Zul. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 (1): 4-7.
- Fitriyanti, Nur Ika dan Herniwati Retno Handayani. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus Daerah (DAK), dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 2 No 3 (2022) 322-335 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1426

- Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 9(2): 82.
- Harahap, Nurkholila. (2018). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten di Sumatera Utara. Skripsi.
- Irianto. Baiq Kisanawati. Istiarto dan BQ. Ertin Helmida . 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Gane Swara*. Vol. 15 (2): 1259.
- Kementerian Keuangan RI, 2021, Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik 2022, Kemenkeu RI, Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, Portal Data TKDD, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Pardede, Nadya Wiandita. (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara. Tesis.
- Pranata, Achmad kelvin. (2020) Pengaruh DAK Fisik Terhadap IPM dan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2010-2018. Skripsi.
- Ridha, Fachrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 64 (2): 259.
- Rimawan, M dan Fenny Aryani. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 9 (3): 291.
- Rinanda, Teja dan Subambang H. 2020. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Hukum & Humaniora*. Vol. 1 (1): 33-34.
- Riviando, Adel. Henri Agustin dan Halmawati. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 1 (1): 13-14.
- Rosmadayanti, Devita. Niniek Imaningsih dan Setya Wijaya. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 2 (8): 1409.
- Sari, Suci Wulan dan Abdul Hamid. 2018. Evaluation Of State Budget Disbursement For Physical Special Allocation Fund Of 2017. *Accounting and Business Information Systems Journal*. Vol. 6 (4): 3-4.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 2 No 3 (2022) 322-335 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1426

- Sunarno, S. (2016). Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.(n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.(n.d.).
- Sulastri, Evi dan Efendri. 2021. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019). *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. Vol. 6 (2): 141.  
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-256.pdf>